

BAB IV

PENUTUP

1.Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang dapat disimpulkan:

1. Implementasi perlindungan hukum hak anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang adalah Anak terlantar yang pada konstitusi wajib diperhatikan oleh negara masih belum mendapatkan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Penelitian yang telah peneliti lakukan ke sembilan Panti Asuhan yang berada di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Jaminan Kesehatan Masih belum dimiliki oleh anak didik panti. Pengelola panti menjelaskan bahwa anak didik panti masih berobat secara mandiri dan di biayai oleh pengelola panti. Pengelola Panti sudah mendaftarkan anak didik Panti agar mendapatkan jaminan kesehatan namun sampai saat ini masih belum terlaksana dan belum mendapatkan kepastian dari BPJS Kesehatan Kota Padang.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang adalah anak yang sudah terpisah dengan orang tuanya dan tidak mempunyai identitas resmi baik KTP atau KK akan kesulitan untuk proses pendataan sebagai peserta jaminan kesehatan. Hak yang seharusnya diperoleh anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan oleh BPJS menjadi sebuah ketidakjelasan.. Problem dalam penjelasan diatas membuktikan bahwa kurang jelasnya aturan pelaksana dari BPJS Kesehatan membuat hak

tersebut sulit terlaksana. Pemerintah harus memperhatikan hak-hak anak terlantar khususnya jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang adalah pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan melakukan koordinasi antar Pejabat setempat yaitu Camat berkoordinasi dengan Lurah untuk mendata anak-anak terlantar baik didalam maupun diluar panti yang belum memiliki identitas ataupun jaminan kesehatan. Anak didik Panti yang belum mempunyai identitas difasilitasi identitasnya kemudian diusulkan melalui dinas sosial untuk didaftarkan ke BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).

2. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar Pemerintah Kota Padang merealisasikan dan memfasilitasi Anak terlantar khususnya anak dalam Panti Kota melalui pejabat setempat baik Camat, Kepala Desa, RT,RW untuk dapat mengaktifkan BPJS Kesehatan mereka agar mendapatkan pelayanan yang optimal.
- b. Agar Kementrian Kesehatan dan Kementrian Sosial melakukan koordinasi dan evaluasi peraturan-peraturan pelaksana BPJS Kesehatan dengan mengikutsertakan anak terlantar secara tersendiri, sehingga hak-hak secara konstitusional yang dimiliki anak terlantar khususnya dalam jaminankesehatan dapat terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Agar dilakukan koordinasi antar Pejabatdi lingkungan Kecamatan Koto Tangah yakni Camat, Lurah, RW, RT untuk mendata anak-anak terlantar baik didalam maupun diluar panti yang belum memiliki identitas ataupun jaminan kesehatan, selanjutnya anak didik Panti yang belum mempunyai identitas difasilitasi identitasnya diusulkan melalui Dinas Sosial untuk didaftarkan ke BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asri Wijayanti.2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*.Sinar Grafika, Jakarta.
- Bappenas. 2010. *Kajian Awal Penyusunan Indikator Komposit Perlindungan Anak*, Jakarta.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. “*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*”,Rabbani Publishing, Jakarta.
- Januar Erik. 2021. “Bimibingan Konseling Anak Jalanan; Bandung
- Maiyestati, 2021, *Buku Pedoman Penelitian Proposal dan Tesis*, Universitas Bung Hatta, Padang.
- _____, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Muhammad, Abdulkadir. 2020. *Metode Penelitian Hukum*.Linram Press: Mataram University PressVol. 4.
- Sugiyono. 2021. *Metodologi Penelitian*,Jakarta
- Zaeni, Asyhadie.2007. *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal

- Abdul, Aziz. 2020. “Teknik Analisis Data” *Juornal Sirah Anak Saleh*.
- Akmal. 2018. " Perlindungan Hukum Anak Terlantar Undang-undang N0.7 tahun 2016 di Kota Medan
- Arisman. 2018. “Teori Perlindungan Hukum.” *Pemutusan Hubungan Kerja*.
- Bruno, Latour, and Nursalam. 2013. “Gambaran Umum Lokasi Penelitian.” *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Carma, GOD. 2018. “Teori Perlindungan Hukum.” *Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum*.
- Driss, Bakhouya. 2017. “Jaminan Kesehatan Nasional.” *Hasanuddin Law Review*.
- Fabiana Meijon, Fadul. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak.
- Fadul, Fabiana Meijon. 2019. “Bagaimana Pemilihan Fasilitas Kesehatan

- Tingkat Pertama (FKTP) Oleh Peserta BPJS Di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Tahun 2017.
- Fallis, A.G. 2013. "Teori Kebijakan Implementasi." *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Fitrian, Debby. 2021. "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. Binamulia Hukum
- Haikal, Thio. 2018." Realisasi Perlindungan Anak Terlantar oleh Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung". *Justicia Sains*
- Khoirunnisa, Ratna, Edith. 2020. "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak." *Notarius*.
- Luthfi, Niar Afdhal. 2019. "Efektivitas Penggunaan Pajak Rokok Dan Intercept Dana Alokasi Umum Dalam Mengurangi Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan." *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* 1, No. 2: 143–163. <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>.
- Patel. 2019. "Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)". *Juurnal Kesehatan*: 9–25.
- Rofifah, Dianah. 2020. "Implementasi Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga Iqro." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documen*.
- Serkarina. 2021." Implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Dalam Persiapan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam
- Sri Artina. 2020. Analisis Yuridis tentang perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar.
- Sukadi, Imam. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan". *Journal For Gender Mainstreaming*
- Suparyanto & Rosad. 2020. "Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum." *Jurnal Sosial (2015)*.
- Suparyanto dan Rosad. 2020. "Gambaran Umum Kota Padang." *Perpustakaan Universitas Islam Riau*.
- Syarifudin, Encep. 2004,Teori Kepemimpinan,*Alqalam* 21, No. 102: 459.
- Suprianto, Arip, and Dyah Mutiarin. 2017. "Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional." *Journal of Governace and Public Policy*.
- Widyanti, Novia. 2018. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri Pada Pasien Di RSUD Labuang Baji Kota Makassar." *Skripsi*:129.http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTVkyzIxMDYzM2I0YTViYTgzOGZlYzgwNjI3OWQ1OTE0N2M2ZTRkMw==.pdf.

C. Media Online :

Bahrudin. 2021. “<https://www.metrokini.com/2021/08/26/Ada-2-000-Anak-Terlantar-Di-Kota-Padang-440-Orang-Di-Luar-Panti-Dapat-Bantuan>,”.

Kharimah, Ulfah. 2019. “Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Padang”.

Wibowo, mulyo, Hadi. 2012. “Pemberkalan Dan Pelatihan Bagi Anak-Anak Terlantar”.<http://dokumen.stimaimmi.ac.id/LPPM/PembekalanDanPelatihanBagiAnak-AnakDhuafa.pdf>.